

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat yang telah

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Forum ini bertujuan untuk memberikan wadah partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Forum

Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat yang telah dengan antusias

berpartisipasi, memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga.

Partisipasi aktif dari masyarakat adalah cermin kepedulian dan kesadaran bersama

dalam membangun daerah yang lebih baik.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan

komprehensif mengenai jalannya Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi

Masyarakat. Masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat akan menjadi

bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Simalungun untuk penyempurnaan kebijakan dan program yang telah dan akan

dilaksanakan.

Akhir kata, mohon maaf jika dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik / Forum

Komunikasi Masyarakat terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas

layanan dan partisipasi masyarakat ke depannya.

Pamatang Raya, 20 Mei 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun,

Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19791127 200502 2005

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
BAB II	
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP/FKMFK	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	. 4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP/FKM	. 4
3. Metode Pelaksanaan FKP/FKM	. 4
4. Susunan Acara FKP/FKM	. 4
BAB III	
HASIL PELAKSANAAN FKP/FKM	. 5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Analisis	5
3. Rencana Aksi	. 6
BAB IV	
PENUTUP	. 7
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) / Forum Komunikasi Masyarakat (FKM). Pelaksanaan FKP/FKM diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP/FKM, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP/FKM sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagal wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP/FKM menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, penyelenggaraan FKP/FKM merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP/FKM penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat untuk menghimpun asprirasi pengguna layanan publik tentang pandangan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik//Forum Komunikasi Masyarakat meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
- b. Penyusunan standar pelayanan
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
- d. Survei Kepuasan Masyarakat
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari / Tanggal : Jumat / 17 Mei 2024

b. Tempat Pelaksanaan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat

a. Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

b. Peserta Forum Konsultasi Publik

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Simalungun, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perwakilan media massa, dan masyarakat penerima layanan publik.

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara secara tatap muka.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 s.d 08.45	Pembukaan	Dipandu MC
08.45 s.d 09.00	Pembacaan Doa	
09.00 s.d 10.00	Paparan tentang Pelayanan Adminduk Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun	Kepala Dinas
10.00 s.d. 10.30	Coffee Break	
10.30 s,d 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
12.00 s.d 12.30	Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	
12.30 s.d 13.00	Penutup	

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT

1. Identifikasi Masalah

Terdapat 3 aspirasi dari peserta rapat yaitu :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan jemput bola yang selama ini dilakukan sudah bagus tetapi masih belum spesifik dan tepat sasaran kepada penduduk rentan, kurang mampu dan stunting dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan.
- b. Pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dokumen kependudukan menjadi sulit dan terkendala karena belum dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Masyarakat masih kurang mengetahui tentang Informasi dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga masih kesulitan dalam mengetahui persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukannya
- d. Masih banyak ditemukan data penduduk yang tidak online di lembaga pelayanan publik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pemerintah, dsb

2. Analisis

Masyarakat menginginkan akses pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat selaku penerima layanan.

3. Rencana Aksi

- a. Pelayanan jemput bola adminduk untuk selanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke OPD / lembaga terkait mengenai kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan adminduk agar benar-benar spesifik dan tepat sasaran
- b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan perlu dilakukan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama maka permasalahan bagi masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan nya dapat mempunyai solusi yang baik
- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan baik secara online maupun offline yang mencakup ke semua elemen masyarakat, karena sosialisasi administrasi kependudukan yang selama ini dilakukan ternyata belum optimal.
- d. Perlu dilakukan pelayanan jemput bola terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat mempunyai satu data kependudukan (single identity) yang valid dan terintegrasi ke semua lembaga pelayanan publik. Mengingat juga ke depan Pemerintah Republik Indonesia ke depannya akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memberikan pelayanan.

BAB IV PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat untuk menghimpun asprirasi pengguna layanan publik tentang pandangan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar segera menindaklanjuti hasil dari Forum Konsultasi Publik//Forum Komunikasi Masyarakat.
- Dengan adanya Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan

LAMPIRAN I

Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN **DINAS KEPENDUDUKAN DAN** PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Jl. Tuan Rondahaim, Pamatang Raya 21162 Email:dukcapil@simalungunkab.go.id

Pamatang Raya, 14 Mei 2024

Nomor

: 400.12/340/2024

Sifat Lampiran : -

: Biasa

Hal

: Undangan Forum Konsultasi Publik

Yth.

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas dan berdampak pada penurunan risiko korupsi pada layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat hadir pada

Hari / Tanggal

: Jumat / 17 Mei 2024

Pukul

: 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat

: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahmat Husein Harahap, SH No. WA 0852 6298 9281.

Demikian kami sampaikan, dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19791127 200502 2005

Tembusan:

Bupati Simalungun d.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



TERTIB ACARA

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT / FORUM KONSULTASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

JUMAT, 17 MEI 2024

Jam	Kegiatan	Keterangan	
08.00 s.d 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia - Kabid Dafduk	
08.30 s.d 08.45 WIB	Pembukaan	Pembawa Acara – Roma Ulina Saragi	
08.45 s.d. 09.00 WIB	Pembacaan Doa	Kabid PIAK	
09.00 s.d 10.00 WIB	Paparan tentang Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun	
10.00 s.d. 10.30 WIB	Coffee Break	Panitia – Kabid PDIP	
10.30 s.d 12.00 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator – Sekretaris	
12.00 s.d 12.30 WIB	Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Panitia – Kabid Dafduk – Kabid Capil	
12.30 s.d 13.00 WIB	Penutup	Pembawa Acara – Roma Ulina Saragi	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Tiarli E Sinaga, S.Kom, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b LUNNIP. 19791127 200502 2005

Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP/FKM



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kompleks Perkantoran Jl. Tuan Rondahaim, Pamatang Raya 21162 Email:dukcapil@simalungunkab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor

: 400.12/358/2024

Pada hari ini jumat tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat Pelayanan Publik Berintegritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan jemput bola yang selama ini dilakukan sudah bagus tetapi masih belum spesifik dan tepat sasaran kepada penduduk rentan, kurang mampu dan stunting dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan	Pelayanan jemput bola adminduk untuk selanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke OPD / lembaga terkait mengenai kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan adminduk agar benar-benar spesifik dan tepat sasaran	1 tahun dengan data kelompok sasaran yang didapat dari OPD / Lembaga terkait

Pengurusan ...

2.	Pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dokumen kependudukan menjadi sulit dan terkendala karena belum dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan perlu dilakukan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama maka permasalahan bagi masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan nya dapat mempunyai solusi yang baik	Saat ini pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan masih dalam proses dan setelah penandatangan Perjanjian Kerja Sama akan segera ditindaklanjuti sesuai masa berlaku Perjanjian Kerja Sama
3.	Masyarakat masih kurang mengetahui tentang Informasi dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga masih kesulitan dalam mengetahui persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukannya	Perlu dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan baik secara online maupun offline yang mencakup ke semua elemen masyarakat, karena sosialisasi administrasi kependudukan yang selama ini dilakukan ternyata belum optimal.	1 tahun
4.	Masih banyak ditemukan data penduduk yang tidak online di lembaga pelayanan publik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pemerintah, dsb	Perlu dilakukan pelayanan jemput bola terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat mempunyai satu data kependudukan (single identity) yang valid dan terintegrasi ke semua lembaga pelayanan publik. Mengingat juga ke depan Pemerintah Republik Indonesia ke depannya akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memberikan pelayanan	1 tahun

Pimpinan...

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi maslah, usulan rekomendasi dan jangka waktu dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan semestinya.

Pamatang Raya, 17 Mei 2024

No	Nama	No HP	Jenis	Perwakilan	Tanda Tangan
			Kelamin		
1.	Rirnawati Girang		P	Disdukcapil	m_
2.	Ober Damanik		١ĸ	Bapperida	
3.	,			Camat Raya	`
4.	Jou earney bripa	0813 7540 8779	LK	Lurah	Jof P.
5.	Oan Holman Gilopu		Lk.	Tokoh Agama	(Aluntin)
6.	R. Juntamardi Pulba	0821 61227172	Lk	Tokoh Masyarakat	10/2
7.	Dely Fredo		Lk	Organisasi Kepemudaan	(A)
8.	Juhen SHOPN	683 <i>8</i> 5737 6882	L¥	Media	Ou m
9	Sabar Nawi Saragih	0812 6312 41008	LK	Masyarakat	Lijb.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun,

Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si Pembina Tk. I, IV/b

MNIP 19791127 200502 2005

Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

FORUM KONSULTASI PUBLIK

HARI / TANGGAL : JUMAT / 17 MEI 2044 PUKUL : 08.00 WB- Selesai

[NO	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
	1	Johanner Downik	082386523240	Pria	Masyorakal	dust.
	7	Rehan Prayofa. Purh	6812G3124998	PRIA	WIRA IWASTA	plan.
	3	Subar Harli Saragi	081263124558	Pria	Masyarakat	\$
	4.	Septi argiany	1821 6710 2709	wanita	Uasyaratal -	HAHW-
~/	2	Juhen Stop	083857170	goz Lk	PERS	Se Jon)
	6	Deboa L. Sibiahi		lr.	Capperida	0
	7	Angelita Sipayuna	0812-8830-34	90 Wanita	Masyarakat	Angout.
	8	Juliante Sipayu	-	Warnta	Mosyorakai	duy
	9	Jenniefrima	_	Wanda	Mosygrakat	A
	10 .	HOTTON M. TURNIP.	08126143036	Lati-Lati.	Masyonatat.	Huitai
	11	JENZ PARTZ TAMPUBAAN	0822-7541-4804	uanita	masyarawat	EN
	12	MERI SARABI	J	WANT A	Masyarakat	dinf.
	13	FUJJASEH A. H		LAKI-LAKI	-) <i>F</i>	Face SOZ
	14	GIMMU'		Lari - Vori	Masyaratat	3/MO).
	15	Elida Sinaga	08236223677	Perempuan	Mastarakas	1 Ep
	16	sinta saragi		Perenguan	Masyarural	Dag.
	A	Hendri Jan	olas-	LY	Masyarakas	
	18	Hillon Summio Silalah		LK	Masyarakat	fin
	19	Changan Nin & Purka		<i>l</i> r	Masgaraket	auf.
/	20-	Jon Sanwachi Pulpu	03137840779	1K	Kd. Pem. Roya	JOP.
/	2/	R Jutamardi Pa	2 6122	۷	T. Mosgowke	(All
7/72						

21	OBER MAMMALIK		LK	Bapperida	
22	EDI SAPUTIPA		LK	masyomat	Cast
23	EKA PRAYOCI		LK	MAGNARARAT	4p=
24	· MULIADI		Lk	SETWAN.	24
25	DEDY FREDO		LR	PEMUDA	Of
26	Righawati Bitsang		Pr	PRDUFCARL	
77	Jan Horman Sporm		LV	DISOUKCAPIL	()
78	ttanri J.P. Simawpan		le	Hasyarakak	Burger.
20	Bai piora purba	081283888840	LK	Hasyarara	Bul
30	MEYLANI SIMANSONT	1		Macyarakot	
31	Tenny. J. Nainggold	n 0853-62207	54 P	Masyarakat	Flore
32	DES MAN Sana	17-0802699	07080. L	Masyarakat	344
33	Chymha S. Situdan	_	P	Musyarakat	light.
34	DOFFILLIEN P-STAHLAN	Opy 83552018	LK	Walyenwat.	A.
35	Valentino 2-p-sing	08311513247	LE	masycrakat	Hm.
36	Siti Debata Roz	1	p.	mosyrabot	Shul-
	,				
	38.				
				AH KAR	
				7	
			THE STATE OF THE S		

Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI KEGIATAN

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT / FORUM KONSULTASI PUBLIK **JUMAT, 17 MEI 2024**

PENDAFTARAN PESERTA KEGIATAN





PEMBUKAAN OLEH PEMBAWA ACARA



PEMBACAAN DOA



PAPARAN OLEH KEPALA DINAS







DISKUSI DAN TANYA JAWAB











PENANDATANGANAN BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT







PENUTUPAN

